



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2022. Perumusan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2022 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;

13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan Good Governance untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun dengan tujuan :

- a. Terwujudnya fasilitas administrasi yang optimal kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya.
- c. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan.
- d. Peningkatan kinerja ASN Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang maju dan bermartabat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dilengkapi dengan pendanaan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang telah direncanakan. Atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya rencana kerja dan kebijakan / tindakan yang diperlukan untuk mengatasi faktor – faktor tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ◆ Anggaran Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 314.379.708.692,48. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 264.825.807.354,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,24 %.
- ◆ Adapun target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2020 dan Setelah Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu program tersebut sebesar Rp. 25.995.201.355,28,- terealisasi sebesar Rp.22.511.656.049,- dengan target kinerja sebesar 100% dan teralisasi sebesar 86,60 % . Rendahnya realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran terutama pada kegiatan Biaya Premi Asuransi Kesehatan Dewan (9,88%) dan Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (31,91%). Hal ini terutama disebabkan kurangnya koordinasi antara bagian program dan perlengkapan sehingga data kendaraan yang harus dibayar pajaknya tidak terupdate.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu program tersebut sebesar Rp.12.511.734.100,- dan terealisasi sebesar Rp.6.632.845.015,- dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 53,01%.

Rendahnya realisasi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai akibat tidak terealisasinya Belanja Pengadaan Alat Komunikasi Studio dan Audio (Vidotron) untuk Ruang Rapat Paripurna DPRD karena terbatasnya waktu pengadaan (Kegiatan ini dianggarkan di P-APBD Tahun 2020).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu program tersebut sebesar Rp.2.227.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.004.042.800,- dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 89,97%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu program tersebut sebesar Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.700.000,- dengan target kinerja sebesar 100 % dan realisasi sebesar 32,67.

Rendahnya realisasi pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebagai akibat Pandemi Covid – 19 sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya Kegiatan Senam / Olahraga di kantor.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu program tersebut sebesar Rp.438.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp.401.052.201,- dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91,36%,-

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pagu program tersebut sebesar Rp.185.365.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.300.000,- dengan target kinerja 1 Tahun dan teralisasi sebesar 35,77%.

Rendahnya realisasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi adalah karena tingkat aktivitas Dewan yang menurun sehingga Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi pada Program ini juga menurun.

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pagu program tersebut sebesar Rp.706.930.500,- dan terealisasi sebesar Rp.322.500.000,- dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 45,62% .

Beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

- Transisi antar periode dan pengangkatan formasi Alat Kelengkapan DPRD SU Periode 2019 – 2020 baru dilakukan bulan November 2019 sehingga pembahasan Propemperda membutuhkan waktu yang lebih lama. Propemperda 2020 disahkan pada tanggal 4 Februari 2020.

- Pandemi Covid – 19 pada bulan Maret 2020 menyebabkan penghentian semua kegiatan di pengkajian dan pem bahasan BAPEMPERDA, dan baru dilanjutkan Kembali pada bulan Juli 2020 sehingga waktu untuk mengejar pembahasan usulan Propemperda sangat sempit.

8. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Pagu program tersebut sebesar Rp.164.825.333.137,- dan terealisasi sebesar Rp.131.745.342.175,- dengan target kinerja sebesar 100% dan teralisasi sebesar 79,93%. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik mencakup kegiatan – kegiatan DPRD, antara lain Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Paripurna, Reses, dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPRD sehingga akibat kondisi Pandemi Covid- 19 rangkaian kegiatan – kegiatan ini dikurangi intensitasnya sehingga menyebabkan rendahnya capaian realisasi program.

9. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah

Pagu program tersebut sebesar Rp.136.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.80.000.000,- dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 58,61%.

Secara kumulatif pada tahun 2020 untuk Belanja Tidak Langsung capaian kinerja mencapai 100% dengan serapan dana 94,17% dari anggaran Belanja Tidak Langsung. Sedangkan capaian serapan dana untuk Biaya Langsung Rp 163.778.438.240,- atau 79,09%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 (terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk organisasi dan kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020, yaitu :

1. Tugas

Adapun tugas yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
- e. Penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Penilaian kinerja pelayanan organisasi di Sekretariat DPRD dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisien pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan

mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Jenis Pelayanan yang dapat diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.2 (terlampir).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain :

A. Faktor Internal

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia

B. Faktor Eksternal

- a. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis
- b. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas.
- c. Munculnya peraturan – peraturan baru sehingga harus dilaksanakan penyesuaian dan perubahan.
- d. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD;
2. Optimalisasi ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda sering terlambat dan tidak terprogram;
4. Pengajuan Prolegda belum memuat penjelasan dan atau keterangan menyangkut Ranperda yang diusulkan;
5. Hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi di APBD Provinsi Sumatera Utara;
6. Belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat;
7. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan juga terlambat.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD merupakan bahan utama untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2022, juga merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD Tahun 2022. Rancangan RKPD Tahun 2022, menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan Rencana Kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan Rencana Kerja OPD Tahun 2022. Rancangan RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanja dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkan arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan RKPD Kabupaten/Kota memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Review usulan program dan kegiatan OPD yang dipaduserasikan dengan prioritas pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022, kajian terhadap RKPD Tahun 2022, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait.

Untuk lebih rinci terkait Review tersebut diatas pada Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, tidak ada usulan masyarakat karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak berkaitan/berhubungan langsung dengan masyarakat.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, administrasi/kesekretariatan, administrasi keuangan, persidangan dan risalah, informasi, protokol, hukum dan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, Infrastruktur, transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia), yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi, guna pencapaian ***Pembangunan Yang Berkualitas*** dengan sasaran sampai tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0 %
- b. Pertumbuhan Ekonomi 6,0 %
- c. Gini Rasio 0,360-0,374 %
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6- 4,3 %
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,3%

Reformasi menuntut perubahan paradigma dalam tatanan Pemerintahan. Kegiatan Pemerintahan yang senantiasa dapat diakomodasikan kedalam perubahan kebutuhan masyarakat sehingga administrasi publik dapat ditata kembali. Oleh sebab itu dibutuhkan pemikiran untuk memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan perkembangan ekonomi politik, sosial dan budaya sehingga mendorong pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perencanaan strategis dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah :

“ Meningkatkan Kepuasan Atas Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatnya kepuasan atas fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Prioritas Nasional merupakan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam program prioritas pembangunan Sumatera Utara.

Program prioritas tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Program RKPD Provsu tahun 2022 inilah yang menjadi pedoman bagi OPD dalam menentukan program dan kegiatan untuk mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan, seperti tertera pada tabel 3.1 (terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program dan kegiatan yang disusun Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan prioritas sesuai tujuan dan sasaran. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 1.8.3. Pelaksanaan Medical Chek-up
- 1.9. Layanan Administrasi DPRD
 - 1.9.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2.1.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 2.1.2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2.4.2. Bimbingan Teknis DPRD
 - 2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 2.4.7. Penyusunan Program Kerja DPRD
 - 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 2.5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 2.5.2. Pelaksanaan Reses
 - 2.7. Pembahasan Kerjasama Daerah

- 2.7.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 2.8. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 2.8.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD
 - 2.8.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

4.2. Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan. Secara umum, sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk periode 1 (satu) tahun mendatang yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program.

Sistem dan prosedur kerja merupakan rangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, sistem dan prosedur kerja yang dilaksanakan selama ini adalah bahwa segala keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD harus melalui Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga seluruh kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Medan,

2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIF LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

	PROGRAM/KEGIATAN				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021	
								Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
4.01.04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADIMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100%	89%	100%	87%	87%	100%	92%	91,86%
4.01.04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	98%	98%	100%	99%	99,19%
4.01.04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	71%	100%	91%	91%	100%	87%	87,32%
4.01.04	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	82%	100%	74%	74%	100%	85%	85,23%
4.01.04	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan	Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan	100%	49%	100%	10%	10%	100%	53%	53,00%
4.01.04	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	58%	100%	0%	0%	100%	53%	52,77%
4.01.04	01	01	06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	30%	100%	32%	32%	100%	54%	53,90%
4.01.04	01	01	07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	92%	100%	99%	99%	100%	97%	97,08%
4.01.04	01	01	08	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	99%	100%	67%	67%	100%	89%	88,75%
4.01.04	01	01	09	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	85%	100%	99%	99%	100%	95%	94,54%
4.01.04	01	01	010	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	80%	100%	75%	75%	100%	85%	85,00%
4.01.04	01	01	011	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	6%	100%	84%	84%	100%	63%	63,45%
4.01.04	01	01	012	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	89%	100%	88%	88%	100%	92%	92,23%
4.01.04	01	01	013	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,97%
4.01.04	01	01	014	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	94%	100%	89%	89%	100%	94%	94,28%
4.01.04	01	01	015	Rapat-Rapat konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	100%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	99,58%
4.01.04	01	01	016	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	100%	97%	100%	98%	98%	100%	98%	98,35%
4.01.04	01	01	017	Rapat-Rapat konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	100%	95%	100%	100%	100%	100%	98%	98,23%
4.01.04	01	01	018	Jasa Pengkajian/Tenaga Lainnya Dalam Kegiatan DPRD Provsu	Tersedianya Jasa Pengkajian/Tenaga Lainnya Dalam Kegiatan DPRD Provsu	100%	97%	100%	85%	85%	100%	94%	94,05%

	PROGRAM/KEGIATAN			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021		
							Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
													8 = (7/6)
	2			3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)	
4.01.04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN KAPASITAS DAN EFEKTIVITAS LAYANAN	100%	70%	100%	53%	53%	100%	74%	74,39%
4.01.04	01	02	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	82%	100%	9%	9%	100%	64%	63,53%
4.01.04	01	02	02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	81%	100%	97%	97%	100%	93%	92,80%
4.01.04	01	02	03	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	100%	88%	100%	80%	80%	100%	89%	89,22%
4.01.04	01	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	99%	100%	88%	88%	100%	96%	95,56%
4.01.04	01	02	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	71%	100%	64%	64%	100%	78%	78,48%
4.01.04	01	02	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	77%	100%	79%	79%	100%	85%	85,46%
4.01.04	01	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	96%	100%	99%	99%	100%	98%	98,17%
4.01.04	01	02	08	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	45%	100%	0%	0%	100%	48%	48,40%
4.01.04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN APARATUR	100%	90%	100%	90%	90%	100%	93%	93,32%
4.01.04	01	03	01	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya dengan baik	100%	93%	100%	91%	91%	100%	95%	94,51%
4.01.04	01	03	02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Pakalan Khusus Hari-hari Tertentu dengan baik	100%	62%	100%	85%	85%	100%	82%	82,17%
4.01.04	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR	100%	45%	100%	33%	33%	100%	59%	59,24%
4.01.04	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33,33%
4.01.04	01	05	02	Bimbingan/Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani	Terlaksananya Bimbingan/Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani	100%	69%	100%	33%	33%	100%	67%	67,33%
4.01.04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA YANG TEPAT WAKTU	100%	51%	100%	91%	91%	100%	81%	80,51%
4.01.04	01	06	01	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan baik	100%	0%	100%	78%	78%	100%	59%	59,33%
4.01.04	01	06	02	Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan baik	100%	51%	100%	95%	95%	100%	82%	81,84%

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021		
				Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
										8 = (7/6)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)	
4.01.04 01 23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI	JUMLAH LAPORAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI	100%	66%	100%	36%	36%	100%	67%	67,26%
4.01.04 01 23 01	Penyelenggaraan Protokol Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Protokol Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Masyarakat	100%	66%	100%	36%	36%	100%	67%	67,26%
4.01.04 01 26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH RAPAT DAN DOKUMEN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	10%	100%	46%	46%	100%	52%	52,13%
4.01.04 01 26 01	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru,Labih Tinggi dan	Terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru,Labih	100%	10%	100%	46%	46%	100%	52%	52,13%
4.01.04 01 35	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK	TERCIPTANYA PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK	100%	69%	100%	80%	80%	100%	83%	83,08%
4.01.04 01 35 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	58%	100%	17%	17%	100%	58%	58,38%
4.01.04 01 35 02	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	100%	100%	100%	98%	98%	100%	99%	99,18%
4.01.04 01 35 03	Rapat-rapat Panpuma	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	100%	96%	100%	96%	96%	100%	97%	97,31%
4.01.04 01 35 04	Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	100%	86%	100%	87%	87%	100%	91%	91,10%
4.01.04 01 35 05	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	100%	52%	100%	63%	63%	100%	72%	71,60%
4.01.04 01 35 06	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	3%	100%	25%	25%	100%	43%	42,63%
4.01.04 01 35 07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	33,33%
4.01.04 01 35 08	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	100%	85%	100%	100%	100%	100%	95%	95,10%
4.01.04 01 35 09	Rapat Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD	100%	95%	100%	95%	95%	100%	97%	96,50%
4.01.04 01 35 010	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	100%	56%	100%	0%	0%	100%	52%	52,08%
4.01.04 01 36	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	JUMLAH RAKOR PENINGKATAN PELAYANAN DAN RISALAH	100%	0%	100%	59%	59%	100%	53%	53,00%
4.01.04 01 36 01	Penyusunan Laporan Berkas dan Sidang Pimpinan dan Anggota DPRD Provsu	Terlaksananya Penyusunan Laporan Berkas dan Sidang Pimpinan dan Anggota DPRD Provsu Dengan Baik	100%	0%	100%	59%	59%	100%	53%	53,00%

Medan, 2021
SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020
PROVINSI SUMATERA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13
1	Meningkatnya Kepuasan Atas Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.		Persentase tingkat Kepuasan Atas Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	

Medan, 2021
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA


 H. AFIFI LUBIS, SH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620822 198903 1 003

TABEL 23
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	SEKRETARIAT DPRD										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara			309.790.000.000						
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Provsu	10 dokumen	295.000.000						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	150.000.000						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Sumatera Utara	Jumlah RKA, DPA, dan DPPA Sekretariat DPRD Provsu	5 Dokumen	65.000.000						
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	80.000.000						
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan daerah	100%	17.350.000.000						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Utara	Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	14 bulan	16.800.000.000						

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Orang Pelaksana Pengelola Keuangan OPD	15 orang	450.000.000						
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah dokumen laporan keuangan Sekretariat DPRD Provsu	50 Laporan	50.000.000						
4	Pengelolaan dan Penyiapn Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sumatera Utara	Jumlah dokumen bahan dan tanggapan pemeriksaan BPK, Inspektorat, dan Itjen	100 dokumen	50.000.000						
I.3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	103.070.000.000						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sumatera Utara	Jumlah set pakalan dinas dan atribut untuk ASN, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Pengamanan	400 set	300.000.000						
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV/ Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat.	10 orang	170.000.000						
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab/Kota di Sumatera Utara	Frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan	2400 kali	102.600.000.000						
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		9.175.000.000						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumatera Utara	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	400.000.000						

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sumatera Utara	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	650.000.000						
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Persentase Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	5.650.000.000						
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1.100.000.000						
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Sumatera Utara	Jumlah buku bahan bacaan dan perundang-undangan yang diadakan	50 buku	75.000.000						
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia	Jumlah ASN yang melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	160 orang	1.300.000.000						
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provsu	1 Tahun	2.100.000.000						
1	Pengadaan Mebel	Sumatera Utara	Jumlah pengadaan mebel kantor	20 set	500.000.000						
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	30 set	1.600.000.000						
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	18.925.000.000						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Materai yang disediakan / Jumlah Pengiriman Surat	1675 materai / 500 surat	25.000.000						

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumatera Utara	Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	3.750.000.000						
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	750.000.000						
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	14.400.000.000						
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	15.075.000.000						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumatera Utara	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	1 Tahun	175.000.000						
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumatera Utara	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	1.400.000.000						
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumatera Utara	Persentase pemeliharaan gedung kantor dan peralatan kantor	100%	13.500.000.000						
I.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah anggota DPRD-SU yang menerima pelayanan keuangan dan kesejahteraan	100 orang	142.700.000.000						
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Anggota DPRD-SU yang menerima Gaji dan Tunjangan	100 orang	140.000.000.000						

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Anggota DPRD-SU yang menerima Pakaian Dinas dan Atribut	100 orang	2.000.000.000						
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Anggota DPRD-SU yang melaksanakan Medical Check Up	100 orang	700.000.000						
I.9	Layanan Administrasi DPRD	Indonesia	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	1.100.000.000						
1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indonesia	Persentase fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	100%	500.000.000						
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sumatera Utara	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	100%	600.000.000						
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	214.780.000.000						
II.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Sumatera Utara	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	11.200.000.000						
1	Pembahasan Rancangan Perda	Sumatera Utara	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	12 perda	10.000.000.000						
2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Naskah Akademik yang dikaji/Jumlah Jasa Hukum Yang Digunakan	6 NA / 10 Kegiatan	1.200.000.000						

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	10.080.000.000						
1	Bimbingan Teknis DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Anggota DPRD-SU yang mengikuti Bimbingan Teknis	100 orang	1.950.000.000						
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	100%	1.200.000.000						
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sumatera Utara	Jumlah kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD-SU	47 orang	4.230.000.000						
4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sumatera Utara	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD-SU	1 kegiatan	2.700.000.000						
II.3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sumatera Utara	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	88.000.000.000						
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab/Kota di Sumatera Utara	- Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam rangka LPJP - Jumlah bulan pelaksanaan kunjungan kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	1 Keg./12 bulan	22.000.000.000						
2	Pelaksanaan Reses	Kab/Kota di Sumatera Utara	Frekuensi pelaksanaan kegiatan Reses	3 Kali	66.000.000.000						

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.4	Pembahasan Kerjasama Daerah	Sumatera Utara	Persentase pembahasan kerjasama daerah	100%	1.500.000.000						
1.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sumatera Utara	Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	100%	1.500.000.000						
II.5	Fasilitasi Tugas DPRD	Indonesia	Persentase Terlaksananya	100%	104.000.000.000						
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Utara	- Jumlah Bulan pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU, - Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri	12 bulan	86.500.000.000						
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100%	17.500.000.000						
JUMLAH					524.570.000.000						

Medan, 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 02	SEKRETARIAT DPRD								
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara		309.790.000.000				354.910.000.000
4 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Provsu	Sumatera Utara	35 dokumen	295.000.000	APBD		35 dokumen	330.000.000
4 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	20 dokumen	150.000.000	APBD		20 dokumen	165.000.000
		Jumlah Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provsu	Sumatera Utara	10 dokumen	50.000.000	APBD		10 dokumen	55.000.000
		Tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD	Sumatera Utara	10 dokumen	100.000.000	APBD		10 dokumen	110.000.000
4 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah RKA, DPA, dan DPPA Sekretariat DPRD	Sumatera Utara	5 dokumen	65.000.000	APBD		5 dokumen	75.000.000
4 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	10 dokumen	80.000.000	APBD		10 dokumen	90.000.000
		Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah	Sumatera Utara	8 dokumen	50.000.000	APBD		8 dokumen	60.000.000
		Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat DPRD	Sumatera Utara	2 dokumen	30.000.000	APBD		2 dokumen	30.000.000
4 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan daerah	Sumatera Utara	100%	17.350.000.000	APBD		100%	18.610.000.000
4 02 01 1.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	14 bulan	16.800.000.000	APBD		14 bulan	18.500.000.000
4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang Pelaksana Pengelola Keuangan OPD	Sumatera Utara	15 orang	450.000.000	APBD		15 orang	500.000.000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU
			1	2	3	4		5	6
4 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Sekretariat DPRD Provsu	Sumatera Utara	50 laporan	50 000 000	APBD		50 laporan	55 000 000
4 02 01 1.02 05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan dan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan dan tanggapan pemeriksaan BPK, Inspektorat, dan Ijjen	Sumatera Utara	100 dokumen	50 000 000	APBD		100 dokumen	55 000 000
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Sumatera Utara	100%	103.070.000.000	APBD		100%	129.485.000.000
4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas dan atribut untuk ASN, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Pengamanan		400 set	300 000 000	APBD		400 set	300 000 000
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV/ Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat.	Sumatera Utara	10 orang	170.000.000	APBD		10 orang	185 000 000
		Belanja Bimbingan Teknis	Indonesia	10 orang	170.000.000	APBD		10 orang	185 000 000
4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan	Sumatera Utara	2400 kali	102 600 000 000	APBD		2400 kali	129 000 000 000
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Sumatera Utara	100%	9.175.000.000	APBD		100%	10.100.000.000
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumatera Utara	100%	400 000 000	APBD		100%	450 000 000
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Sumatera Utara	100%	650 000 000	APBD		100%	750 000 000
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sumatera Utara	100%	5 650 000 000	APBD		100%	6 150 000 000
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	100%	1.100 000 000	APBD		100%	1 250 000 000
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah buku bahan bacaan dan perundang-undangan yang diadakan	Sumatera Utara	50 buku	75 000 000	APBD		100 buku	150 000 000

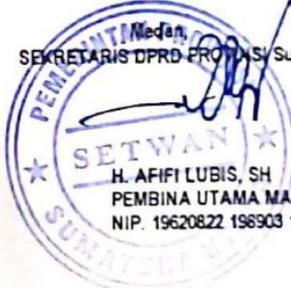
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIPAAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 02 01 1 06 07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi	Sumatera Utara	160 orang	1 300 000 000	APBD		160 orang	1 500 000 000
		Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	Sumatera Utara	110 orang	750 000 000	APBD		110 orang	800 000 000
		Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	Sumatera Utara	50 orang	550 000 000	APBD		50 orang	700 000 000
4 02 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Sumatera Utara	50 set	2.100.000.000	APBD		50 set	2.000.000.000
4 02 01 1 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor	Sumatera Utara	20 set	500 000 000	APBD		20 set	500 000 000
4 02 01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Sumatera Utara	30 set	1.600 000 000			30 set	1.500 000 000
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Sumatera Utara	100%	18.925.000.000	APBD		100%	20.650.000.000
4 02 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan / Jumlah Pengiriman Surat	Sumatera Utara	1675 materai / 500 surat	25 000 000	APBD		1700 materai / 500 surat	35 000 000
4 02 01 1 08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Sumatera Utara	12 bulan	3.750.000.000	APBD		12 bulan	4 000 000 000
4 02 01 1 08 03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	100%	750 000 000	APBD		100%	750 000 000
4 02 01 1 08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor DPRD Provsu	Sumatera Utara	100%	14.400.000.000	APBD		100%	15 900 000 000
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Provsu	Sumatera Utara	100%	15.075.000.000	APBD		100%	15.635.000.000
4 02 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Sumatera Utara	76 unit	175.000.000	APBD		76 unit	185 000 000
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Sumatera Utara	100%	1.400.000.000	APBD		100%	1 450 000 000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJJI RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 02 01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Pemeliharaan Gedung Kantor	Sumatera Utara	100%	13.500.000.000	APBD		100%	14 000 000 000
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD-SU yang menerima pelayanan keuangan dan kesejahteraan	Sumatera Utara	100 orang	142.700.000.000	APBD		100 orang	156.850.000.000
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang menerima Gaji dan Tunjangan	Sumatera Utara	100 orang	140.000.000.000	APBD		100 orang	154 000 000 000
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang menerima Pakaian Dinas dan Atribut	Sumatera Utara	100 orang	2.000.000.000	APBD		100 orang	2 150 000 000
4 02 01 1.15 09	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang melaksanakan Medical Check Up	Sumatera Utara	100 orang	700.000.000	APBD		100 orang	700 000 000
4 02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Sumatera Utara	100%	1.100.000.000	APBD		100%	1.250.000 000
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Sumatera Utara	100%	500.000.000	APBD		100%	600 000 000
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Sumatera Utara	100%	600.000.000	APBD		100%	650 000 000
4 02 02 1 01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sumatera Utara	100%	214.780.000.000	APBD		100%	218.540.000.000
4 02 02 1 01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Sumatera Utara	100%	11.200.000.000	APBD		100%	12.000.000.000
4 02 02 1 01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	Sumatera Utara	12 perda	10.000.000.000	APBD		12 perda	10 000 000 000
4 02 02 1 01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Naskah Akademik yang dikaji/Jumlah Jasa Hukum Yang Diquanakan	Sumatera Utara	6 NA / 10 Kegiatan	1.200 000 000	APBD		6 NA / 10 Kegiatan	2 000 000 000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sumatera Utara	100%	10.080.000.000	APBD		100%	11.176.000.000
4 02 02 1.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang mengikuti Bimbingan Teknis	Sumatera Utara	100 orang	1.950.000.000	APBD		100 orang	1.950.000.000
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Sumatera Utara	100%	1.200.000.000	APBD		100%	1.250.000.000
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD SU	Sumatera Utara	47 orang	4.230.000.000	APBD		47 orang	5.076.000.000
		Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD-SU	Sumatera Utara	38 orang	3.420.000.000	APBD		38 orang	4.104.000.000
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi - Fraksi DPRD-SU	Sumatera Utara	9 orang	810.000.000	APBD		9 orang	972.000.000
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD-SU	Sumatera Utara	1 kegiatan	2.700.000.000	APBD		1 kegiatan	2.900.000.000
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sumatera Utara	100%	88.000.000.000	APBD		100%	105.000.000.000
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	- Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam rangka LPJP - Jumlah bulan pelaksanaan kunjungan kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU	Sumatera Utara	1 Keg /12 bulan	22.000.000.000	APBD		1 Keg /12 bulan	24.000.000.000
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Frekuensi pelaksanaan kegiatan Reses	Sumatera Utara	3 Kali	66.000.000.000	APBD		3 Kali	81.000.000.000
4 02 02 1.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	Sumatera Utara	100%	1.500.000.000	APBD		100%	1.364.000.000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJJI RENCANA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 02 02 1 07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tertindakannya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sumatera Utara		1.500.000.000	APBD			1.364.000.000
		Jumlah Media Yang Digunakan Sebagai Bahan Publikasi	Sumatera Utara	20 Media	1.006.000.000	APBD		20 Media	1.000.000.000
		Jumlah Bahan Bacaan Koran/Media Cetak	Sumatera Utara	58000 eks	350.000.000	APBD		60000 eks	220.000.000
		Pengganti Biaya Transport untuk wartawan unit DPRD Provsu	Sumatera Utara	200 Orang	144.000.000	APBD		200 Orang	144.000.000
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tertindakannya Fasilitasi Tugas DPRD	Sumatera Utara	100%	104.000.000.000	APBD		100%	89.000.000.000
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Jumlah Bulan pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU/Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri	Sumatera Utara	12 bulan	86.500.000.000	APBD		12 bulan	70.000.000.000
4 02 02 1.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sumatera Utara	100%	17.500.000.000	APBD		100%	19.000.000.000
TOTAL					524.570.000.000				573.450.000.000

Medan, 2021
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI Sumatera Utara


SETWAN
 H. AFIFI LUBIS, SH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620822 198903 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043, Fax. (061) 452270
MEDAN

Kode Pos 20112

Email: Humas.dprdsunut@gmail.com

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 19.C /KS/2021**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

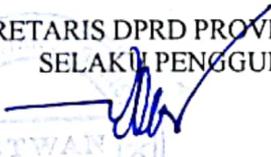
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renja T.A. 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara perlu dibentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 4014);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan DPRD Provsu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRDSU;
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
- Menyusun program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
 - Membuat laporan pertanggung jawaban hasil-hasil pekerjaan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provsu Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Maret 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

Tembusan :

- Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
- Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 10.C / KS/2021
Tanggal : 02 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara |
| 2. Ketua | Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provsu |
| 3. Sekretaris | Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran |
| 4. Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kabag Umum2. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan3. Kabag Persidangan dan Perundang - Undangan4. Kasubbag Fasilitasi Penganggaran5. Kasubbag Perlengkapan6. Kasubbag Kajian Perundang - Undangan7. Kasubbag Rumah Tangga8. Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan9. Afriani, SE
NIP. 19820428 200904 2 00710. Hasanuddin Ambarita, A.Md
NIP. 19850125 201001 1 00711. Ferdi Irvansyah |

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198908 1 003